

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Di dalam fenomena-fenomena mengenai kependudukan dikenal istilah migrasi. Migrasi pada intinya berbicara mengenai perpindahan individu dari satu tempat ke tempat yang lain dengan didasari atas berbagai pertimbangan baik itu politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Tentunya dalam pembicaraan mengenai migrasi juga tidak dapat terlepas dari dampak-dampak maupun permasalahan-permasalahan yang muncul akibat migrasi. Di dalam terjadinya migrasi, faktor ekonomi menjadi penyebab paling besar bagi terjadinya perpindahan penduduk tersebut. Walaupun faktor-faktor lain semisal politik, sosial, maupun budaya juga tidak bisa dikesampingkan.

Pernyataan awal tersebut sejalan dengan ungkapan dari Todaro, yang mengatakan bahwa memang dalam latar belakang migrasi, faktor ekonomi lah yang banyak menjadi penyebabnya. Hal ini sesuai seperti yang dikatakan oleh para ahli bahwa faktor yang menarik bagi pendatang ke kota-kota bukan saja pengakuan akan keberadaan mereka, namun juga harapan akan adanya penghasilan yang lebih bagus (Sjahrir, 1990:8).

Di dalam ungkapan tersebut menggambarkan tentang bagaimana desa tidak dapat menyediakan peluang-peluang ekonomi (lebih) yang dapat dimasuki oleh

masyarakatnya. Desa dapat dipandang sebagai sesuatu yang hanya tergantung pada alam di dalam tradisi kehidupannya. Memang dengan kondisi seperti itu membuat masyarakatnya banyak yang berpikir mengenai upaya-upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup atau lebih tepatnya adalah usaha untuk mencapai kesejahteraan hidup yang maksimal. Maka tidak heran bila pada perkembangannya, banyak penduduk yang beralih profesi dari sektor agraris menuju ke sektor industri. Maka dari situ tampak jelas bahwa telah terdapat ketimpangan antara desa dengan kota khususnya dalam hal nilai kefaedahannya.

Kasus-kasus ketimpangan yang ada antara desa dengan kota dapat dilihat pada data statistik tentang daerah miskin yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2002. Pada Februari 2002, jumlah penduduk miskin Indonesia tercatat sebesar 38,4 juta jiwa, dimana sekitar 65,36 persen tinggal di pedesaan. Selama kurun waktu 1999-2002, perubahan penduduk miskin baik secara absolut maupun prosentase nampak bervariasi. Beberapa propinsi mengalami kenaikan sementara propinsi lainnya menurun. Secara absolut, propinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan propinsi yang mengalami kenaikan penduduk miskin paling banyak, yaitu sekitar 597,8 jiwa. Sementara itu propinsi Jawa Barat merupakan propinsi yang mengalami penurunan penduduk miskin paling banyak, yaitu sekitar 3.455,2 jiwa (Badan Pusat Statistik,2002:572).

Dari ketimpangan tersebut timbullah kesukaran ekonomi bagi masyarakat desa. Sehingga dapat dimengerti bila ketimpangan yang terjadi akan memunculkan respon atau tindakan dari masyarakat desa guna keluar dari kungkungan

ketimpangan. Dari respon-respon tersebut jika diamati ternyata terbagi menjadi dua bagian besar yakni, tetap bertahan di desa atau memilih keluar dari desa dengan jalan migrasi ke kota-kota.

Respon atas ketimpangan dengan cara melakukan migrasi ke kota tersebut memunculkan suatu pengertian bahwa kota adalah merupakan suatu jawaban untuk keluar dari kungkungan ketimpangan yang selama ini terjadi. Keputusan untuk bermigrasi tersebut akan terjadi jika ada faktor pendorong (*push*) dari tempat asal dan faktor penarik (*pull*) dari tempat tujuan. Tempat lama menjadi kekuatan pendorong jika di tempat tersebut lebih banyak terdapat faktor negatif (kebutuhan yang tak terpenuhi) dibandingkan dengan faktor positif (kebutuhan terpenuhi) (Tukiran, Haris, Kutaneegara, dan Setiadi, 2002:73).

Pada kasus migrasi di Indonesia, faktor *push and pull* juga terdapat di kota-kota besar yang ada di Indonesia contohnya Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, dan Medan. Bisa dikatakan bahwa kota-kota tersebut telah mengalami pertumbuhan yang pesat dibandingkan dengan kota-kota lainnya yang ada di Indonesia. Dari sekian banyak migran yang bermigrasi ke kota-kota yang ada di Indonesia, kebanyakan terserap pada sektor formal maupun informal.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Bappeda Jakarta, golongan migran yang ada di Jakarta mempunyai pola keteraturan tertentu dalam kehidupan sosial ekonominya. Pola menolong dirinya sendiri (*natural helping system*) yang mereka kembangkan ternyata telah menciptakan strategi hidup yang ulet dalam mempertahankan kehidupan mereka di perkotaan (www.bappedajakarta.go.id).

Strategi bertahan hidup di kota yang dilakukan oleh para migran sangat erat kaitannya dengan kondisi sosial dan ekonomi yang melingkupi kehidupan migran itu sendiri. Kondisi sosial ekonomi yang melingkupi migran pun juga tidak bisa dilepaskan dari permasalahan yang sama, yang mereka hadapi di desa yakni kemiskinan. Oleh karena itu jaringan-jaringan sosial yang ada yang dikembangkan oleh migran dengan sesamanya, akan menjadi kunci utama bagi strategi bertahan hidup migran di perkotaan. Selain jaringan sosial yang terus dijaga, sisi kondisi ekonomi buruh migran yang bisa dilihat dari gajinya yang amat minim, juga turut mempengaruhi strategi apa yang dipilih atau dilakukan untuk mencukupi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraannya.

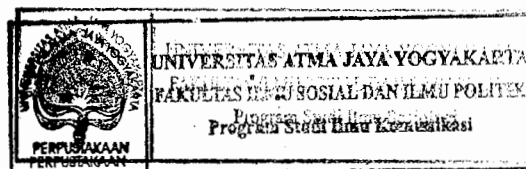
Di lain pihak, dampak negatif pun muncul akibat banyaknya jumlah migran terutama yang berada di sektor perburuhan. Salah satu contohnya adalah mengenai munculnya perumahan-perumahan liar yang kebanyakan juga ditempati oleh kaum-kaum migran. Munculnya perumahan liar tersebut memang diikuti dengan penggusuran yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat. Hal ini bisa dimengerti karena pemerintah memang hanya melaksanakan keputusan hukum yang berlaku. Akan tetapi bagi para kaum migran yang bertempat tinggal di kawasan seperti itu, hal tersebut semakin membuat hidup mereka menjadi bertambah sulit. Padahal mereka bisa dikatakan hanyalah korban dari adanya calo-calo tanah atau mafia tanah. Data mengenai penggusuran yang disebutkan dari majalah Suara Publik (Edisi Oktober 2003), yang didapat dari YLBHI berikut ini dapat dijadikan contoh mengenai peristiwa penggusuran yang dialami oleh penduduk yang menghuni rumah-

rumah yang dikategorikan “liar”. Data tersebut menunjukkan korban penggusuran paksa warga kota sepanjang 2003 di Jakarta tercatat 1,633 KK, yang terdiri dari warga wilayah Tambora, Jakarta Barat 1,470 KK; warga wilayah Cengkareng Timur, Jakarta Barat 1,400 KK; warga Duren Sawit, Jakarta Timur 40 KK; dan warga Tanjung Duren 200 KK. Angka ini menurut YLBI masih bisa bertambah jika rencana penggusuran di TPU Tegal Alur, Jakarta Barat; Muara Angke, Kapuk Muara, dan Penjaringan, ketiganya di Jakarta Utara jadi dilaksanakan. Korban-korban penggusuran ini memang kebanyakan adalah penduduk migran yang miskin dan tidak mempunyai identitas yang jelas sebagai penduduk pendatang ataupun penduduk asli.

Predikat miskin yang disandang oleh kaum pendatang kebanyakan melekat pada migran yang mempunyai status sebagai pekerja kelas dua seperti buruh. Hal ini perlu ditekankan, karena memang faktor upah dari buruh itu sendiri yang tidak memungkinkan bagi mereka untuk keluar dari kemiskinan. Artinya bahwa faktor upah yang dalam hal ini juga termasuk status bekerja mereka, menjadi faktor penting bagi munculnya kemiskinan tersebut. Maka sekali lagi bahwa strategi bertahan hidup di perkotaan menjadi sangat penting bagi kaum buruh migran agar mereka tetap bisa mencapai tujuannya datang ke kota yakni meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Gambaran nyata dari kondisi seperti di atas dapat dilihat pada tempat-tempat dimana kaum migran tinggal:

“kampung-kampung tempat buruh migran tinggal sangat kumuh, penuh sesak oleh bangunan semi permanen yang terbuat dari tembok setengah jadi dan papan kayu. Penghuninya harus makan dan tidur berjejalan di tempat yang



sempit itu, masing-masing rumah dihuni tiga sampai sepuluh orang”, (Tempo, Edisi 2/2003).

Gambaran sekilas mengenai tempat tinggal para buruh migran itu dapat dijadikan cerminan realitas dari kondisi sosial buruh migran di perkotaan. Bahkan tidak cukup sampai disitu saja, ada juga fenomena yang menyatakan bahwa:

“harga sewa kamar di daerah kumuh bervariasi antara Rp.100.000- Rp.150.000 per bulan termasuk listrik. Harga seperti itu pun dirasakan para buruh terlalu mahal mengingat gaji yang mereka terima hanya setara dengan UMP sebesar Rp. 631.554. “Jika tidak ada uang kami terpaksa utang”, kata mereka”, (Kompas, Rabu 16 April, 2003).

Berangkat dari ungkapan tersebut di atas, maka dapat dilihat bahwa kehidupan ekonomi buruh migran belum bisa dikatakan sejahtera. Kesejahteraan yang merupakan tujuan dari migran bermigrasi, kemungkinan belum bisa dapat dicapai jikalau migran masih saja terjebak di dalam kemiskinan kota. Maka migrasi yang ada di Jakarta ataupun kota-kota di negara berkembang lainnya dapat dikatakan masih tergolong *non-educated labour migration*. Sehingga apa yang mereka lakukan cenderung merupakan suatu strategi untuk kelangsungan hidup (*survival strategy*) (Haris, 2002:21).

Akan tetapi walau kondisi kehidupan sosial ekonomi yang dijalani di kota dapat dikategorikan miskin, keadaan itu akan berubah 180 derajat bila buruh migran pulang ke daerah asalnya. Hal ini disebabkan karena kehidupan desa yang menganggap bahwa para migran mempunyai penghasilan yang besar bila bekerja di kota, tanpa mengetahui bahwa kehidupan para migran di kota sendiri sangat

memprihatinkan. Melalui pola pikir seperti itu, telah menjadikan kota-kota seperti Jakarta semakin dipadati oleh para migran dari tahun ke tahun. Tentu saja hal ini mengakibatkan konsekuensi yang tidak kecil bagi sisi kehidupan sosial ekonomi migran itu sendiri. Dengan semakin kompleks dan padatnya perkotaan, maka bentuk konsekuensi-konsekuensi seperti penggusuran, pengangguran, lingkungan kumuh, penindasan dan lain lain itu adalah merupakan gambaran nyata kehidupan di perkotaan.

1.2. Rumusan Masalah

Ketimpangan sebagai salah satu alasan pokok terjadinya migrasi, telah menciptakan jurang pemisah yang teramat dalam antara desa dengan kota. Adanya perbedaan nilai upah yang cukup besar juga membuat angka migrasi semakin lama semakin membesar. Berangkat dari kedua hal tersebut, maka menjadikan kota memiliki faktor pendorong (*push*) dan penarik (*pull*) bagi migran untuk datang ke kota-kota guna menaikkan kesejahteraan hidup. Kota dipandang memiliki jawaban bagi kesukaran ekonomi yang dialami buruh migran di daerah asalnya. Harapan mereka tentang pendapatan yang besar, akan terpenuhi jika bermigrasi dengan jalan bekerja di kota sehingga harapan untuk bisa hidup sejahtera akan tercapai.

Akan tetapi ketika bermigrasi, sebagian migran seringkali malah terjebak di dalam kemiskinan. Hal itu bisa dilihat dari kondisi sosial dan ekonomi buruh migran yang melingkupi kehidupan sehari-hari mereka. Penciptaan jaringan-jaringan sosial dengan memilih tinggal bersama-sama dengan sesama perantau yang satu daerah atau

etnis, sampai dengan kegiatan-kegiatan perkumpulan semisal arisan, paguyuban warga yang itu dilakukan semata-mata demi berlangsungnya kehidupan sosial mereka sekaligus juga sebagai jaring pengaman bagi keberlangsungan hidup mereka ketika mengalami kesulitan. Rendahnya pendapatan buruh juga turut membuat kondisi ekonomi buruh migran di kota masih bisa dikatakan belum sejahtera. Belum sejahteranya buruh migran, juga bisa dilihat melalui pola-pola hidup buruh yakni pola tempat tinggal, pola makan, pola interaksi, dan lain-lain.

Dari sekilas mengenai kondisi sosial ekonomi buruh migran pada paragraf diatas, ternyata tidak sedikit juga dampak-dampak yang muncul akibat dari meledaknya angka migran khususnya di Jakarta. Selain tentunya kemiskinan, dampak yang lain contohnya adalah pengangguran, munculnya perumahan liar, bahkan sampai angka kejahatan yang semakin meningkat. Begitu pun dengan kondisi sosial ekonomi buruh migran yang ada kampung Kayu Besar. Kampung yang bisa dikatakan kumuh tersebut memang menjadi pilihan bagi ribuan migran untuk bertempat tinggal. Pilihan untuk bertempat tinggal di kampung tersebut kemungkinan memang sebagai salah satu strategi buruh migran dalam menyasati kecilnya upah yang mereka terima di tempat mereka bekerja. Padahal dengan upah yang masih minimum tersebut kebutuhan hidup harus selalu terpenuhi, maka tidak heran jika pilihan tersebut sangat logis dan relevan dengan kondisi sosial ekonomi mereka. Dari kondisi lingkungan kampung yang tampak kumuh tersebut, dapat pula untuk menggambarkan bahwa kemiskinan adalah potret nyata kehidupan migran di sektor formal.

Masalah yang ingin diteliti dalam penelitian ini adalah :✓

- *Bagaimana kondisi ekonomi dan sosial buruh migran yang terjebak dalam kemiskinan di Kayu Besar, Jakarta?*
- *Bagaimana bentuk strategi bertahan hidup buruh migran di tengah kondisi sosial dan ekonominya tersebut ?*

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran secara realistis dan mendetail mengenai kehidupan sosial dan ekonomi para buruh migran yang terjebak kemiskinan dalam kehidupannya di kota. Tujuan berikutnya adalah untuk menganalisa bentuk-bentuk strategi bertahan hidup atau *survival strategy* yang dijalankan oleh para buruh migran di tengah kehidupan sosial dan ekonomi yang menghimpit hidupnya.

1.4. Kerangka Teori

Untuk menjelaskan mengenai fenomena buruh migran sangat diperlukan pemahaman yang mendasar terlebih dahulu terhadap penyebab dari adanya hal tersebut. Oleh karena itu sangat diperlukan teori-teori yang berkaitan dengan tindakan-tindakan manusia atau perilaku-perilaku manusia yang dipandang dapat menggambarkan mengenai fenomena itu..

Berkaitan dengan hal tersebut, Todaro dan Stilkind memandang bahwa urbanisasi muncul karena adanya kebijakan yang mementingkan industri dan mengabaikan pertanian ditambah pula dengan kecenderungan untuk mementingkan kota (urban bias) dalam investasi pemerintah dibidang sarana umum, sehingga hal itu makin mendesak dan merangsang kaum miskin didesa untuk pindah ke kota dengan segala konsekuensi ekonomi dan sosial yang nampak di kota-kota besar (Todaro dan Stilkind,1996:22).

Berangkat dari pandangan tersebut, maka secara nyata dapat ditangkap makna bahwa percepatan migrasi atau lebih tepatnya urbanisasi telah menimbulkan berbagai macam dampak baik itu sosial, ekonomi, budaya maupun politik. Contoh nyata dari adanya fenomena itu adalah tidak terkendalinya jumlah penduduk yang mendiami daerah perkotaan. Buruh migran sebagai salah satu bagian penduduk yang mendiami daerah perkotaan, dengan meledaknya jumlah penduduk, maka bisa diartikan turut andil dalam timbulnya berbagai permasalahan dalam diri masyarakat itu sendiri. Gambaran dari permasalahan itu adalah seperti terjadinya gesekan antar penduduk, kurangnya lahan pemukiman, terbatasnya lapangan pekerjaan sehingga menambah angka pengangguran, dan lemahnya posisi tawar terhadap lembaga-lembaga ekonomi yang ada.

Studi kasus mengenai dampak-dampak dari migrasi dapat dilihat pada negara Thailand. Di Thailand, pada saat terjadinya ledakan ekonomi di Bangkok, banyak penduduk pedesaan dari bagian timur laut Thailand bermigrasi ke kota tersebut untuk mengisi lowongan kesempatan kerja. Namun pada saat terjadinya krisis ekonomi

yang melanda negara tersebut, angka migrasi yang cukup tinggi menjadi salah satu problem yang sangat serius karena angka pengangguran menjadi semakin meningkat. Maka dari itu, kebanyakan para pekerja di sana terpaksa pulang kampung, tetapi kebanyakan pula dari mereka tidak bisa lagi hidup di desa karena keahlian bertani menjadi berkurang sehingga kemungkinan besar akan kembali lagi ke kota walaupun tidak tahu lapangan pekerjaan seperti apa yang masih tersedia (Kompas, Sabtu 4 September 1998).

Kondisi lebih parah diperlihatkan oleh salah satu negara di kawasan Amerika Latin yakni Argentina, yang juga dikenal memiliki angka urbanisasi sangat tinggi. Tingginya angka urbanisasi telah menyebabkan statistik Argentina mempunyai wajah yang sangat menyheramkan. Kondisi tersebut dapat diamati dari data yang disebutkan yakni, tujuh puluh persen keluarga di wilayah perkotaan hidup di dalam kubangan kemiskinan. Dari 23,5 juta penduduk yang tinggal di daerah perkotaan, 12,5 juta penduduk hidup dibawah garis kemiskinan dan 5,8 juta orang adalah berstatus sebagai fakir miskin. GDP Argentina merosot 16,3 % pada kuartal pertama tahun 2002, pengangguran resmi sebanyak 25 %, dan upah riil telah turun hampir 20 % pada tahun berikutnya (Jurnal Ekonomi Rakyat, Oktober 2002).

Berkaca pada kasus yang terjadi pada dua negara di atas, maka dapat dikatakan bahwa di samping digunakan sebagai jalan untuk mencapai kesejahteraan, di sisi lain migrasi menyimpan suatu permasalahan yang cukup besar yang berkaitan dengan kemiskinan. Terjadinya permasalahan itu seringkali disebabkan oleh tidak

berimbangny jumlah migran yang tergolong dalam usia produktif dengan jumlah lapangan pekerjaan yang ada.

Di Indonesia fenomena migrasi tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di kedua negara tersebut di atas. Tidak berimbangny tenaga kerja produktif pada kaum migran dengan besarnya lapangan kerja yang tersedia masih menjadi faktor utama dalam munculnya permasalahan penduduk. Berpijak dari realitas diatas, maka terdapat suatu hal besar yang akan menjadi konsekuensi dari timbulnya faktor tersebut. Konsekuensi itu adalah rendahnya upah pekerja yang oleh para pekerja sektor formal seperti buruh pabrik. Konsekuensi itulah yang menjadi satu-satunya jawaban yang harus mereka terima kalau tetap ingin bertahan bekerja di sektor formal. Padahal kehidupan di perkotaan seperti yang banyak diketahui menuntut biaya yang tinggi. Oleh karena itu dari kedua hal yakni upah rendah dan biaya hidup yang tinggi, akan sangat menentukan bagaimana kondisi sosial dan ekonomi yang melingkupi kehidupan buruh migran di perkotaan serta bentuk strategi bertahan hidup yang dipilih untuk menghadapi kehidupan di perkotaan.

Namun sebelum melangkah lebih jauh, perlu disadari terlebih dahulu pentingnya batasan dari kondisi sosial dan ekonomi dan arti strategi bertahan hidup itu sendiri. Hal ini dilakukan agar terdapat pembedaan yang jelas antara kehidupan buruh migran dengan kehidupan masyarakat diluar buruh. Langkah tersebut juga merupakan salah satu jalan untuk dapat membedakan mengenai kehidupan buruh migran dengan buruh yang bukan migran.

Dalam kehidupan sehari-hari, sosial ekonomi adalah suatu kata yang sulit dipisahkan bila berbicara mengenai salah satu diantaranya. Hal tersebut dikarenakan dasar dari kehidupan setiap manusia selalu menyangkut mengenai kedua hal itu. Bila sosial diartikan sebagai masyarakat dan ekonomi sebagai pemenuhan kebutuhan, maka semakin jelaslah kaitan diantara kedua struktur kehidupan tersebut. Dalam beberapa literatur yang membahas mengenai disiplin ilmu ekonomi, maka terdapat dua cabang besar yang ada di dalamnya yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ragnar Nurkse mengatakan bahwa ekonomi adalah ilmu atau seni tentang upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang banyak, bervariasi, dan berkembang dengan sumber daya yang ada melalui pilihan kegiatan produksi, konsumsi, dan/atau distribusi. Sedangkan untuk mengukur sejauh mana ruang lingkup kebutuhan hidup manusia dapat dipakai tiga indikator yaitu, penghitungan produksi, pendapatan, pengeluaran (Sumodiningrat, 1994:7).

Untuk pengertian dari sosial sendiri, menurut Kamus Ilmiah Populer adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan masyarakat, (Maulana, 2003:484). Soerjono Soekanto (1982) mengemukakan indikator-indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat sosial adalah melalui tiga hal yakni, kekayaan, kekuasaan, kehormatan, ilmu pengetahuan (Soekanto, 1982:205).

Untuk pengertian mengenai strategi bertahan hidup buruh migran, dapat diambil pengertian yakni langkah-langkah yang diambil oleh buruh dalam hal ekonomi maupun sosial sebagai perwujudan dari kondisi sosial dan ekonomi mereka

yang terbelenggu dalam kemiskinan. Langkah-langkah tersebut diambil secara terencana dan penuh perhitungan untuk meminimalkan resiko kegagalan.

Berangkat dari batasan kondisi sosial dan ekonomi serta strategi bertahan hidup yang ada, maka akan memudahkan jalan untuk menggambarkan sebuah realitas kondisi sosial dan ekonomi para buruh. Gambaran kehidupan ekonomi para buruh seperti yang telah disebutkan pada sub bab latar belakang dan rumusan masalah, secara implisit telah menyebutkan bahwa terjadi kemiskinan dalam kehidupannya. Maka dari itu teori kemiskinan kemudian digunakan untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini karena dipandang dapat menjelaskan bagaimana sebuah kemiskinan itu terjadi dan bagaimana kondisi realistis dari kemiskinan itu sendiri.

Teori kemiskinan secara sederhana dapat dibagi menjadi dua perspektif besar yakni kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Diharapkan melalui pendekatan kedua teori ini akan dapat diperoleh pemahaman yang nyata tentang kemiskinan seperti apa yang menimpa kehidupan para migran di perkotaan, khususnya para migran yang berada di sektor formal seperti buruh pabrik.

Oscar Lewis dalam analisisnya mengenai kemiskinan mendasarkannya pada kebudayaan kemiskinan di dalam terjadinya kemiskinan itu sendiri. Kebudayaan kemiskinan terjadi karena pola-pola kelakuan dan sikap-sikap yang ditunjukkan oleh orang miskin adalah suatu cara yang paling tepat untuk dapat tetap melangsungkan kehidupan yang serba kekurangan tersebut, maka dengan kondisi seperti itu telah mendorong terwujudnya sikap-sikap menerima nasib, meminta-minta, ataupun

mengharapkan bantuan dan sedekah. Namun sebenarnya dengan kelakuan dan tindakan seperti itu, sesungguhnya merupakan suatu usaha untuk memerangi kemiskinan yang mereka hadapi. Dalam tumbuh dan berkembangnya kebudayaan kemiskinan, Oscar Lewis menyatakan bahwa hal tersebut cenderung akan terjadi pada masyarakat yang mempunyai kondisi, *pertama*, sistem ekonomi dan sistem produksi yang hanya berorientasi pada keuntungan; *kedua*, tingginya tingkat pengangguran dan setengah pengangguran; *ketiga*, rendahnya upah buruh; *keempat*, tak berhasilnya golongan berpenghasilan rendah meningkatkan organisasi sosial, ekonomi, politiknya secara sukarela maupun atas prakarsa pemerintah; *kelima*, sistem keluarga bilateral lebih menonjol daripada sistem unilateral; *keenam*, kuatnya nilai-nilai pada kelas yang berkuasa yang menekankan penumpukan harta kekayaan dan adanya kemungkinan mobilitas vertikal, serta sikap adanya anggapan bahwa rendahnya status ekonomi adalah sebagai hasil ketidaksanggupan pribadi atau memang pada dasarnya sudah rendah kedudukannya. Dari situ Oscar Lewis mendefinisikan kebudayaan kemiskinan merupakan suatu adaptasi atau penyesuaian dan sekaligus juga merupakan reaksi kaum miskin terhadap kedudukan marginal mereka di dalam masyarakat yang berstatus kelas, sangat individualistis, dan berisi kapitalisme (Suparlan, 1984:5-7).

Sedangkan Jellinek dalam pengertian kemiskinan struktural, menyatakan bahwa yang patut disalahkan dalam kemiskinan tersebut adalah masyarakat yang telah memaksa penduduk terjebak di dalam kemiskinan. Dalam hal tersebut padahal golongan miskin memiliki inisiatif, kemampuan dan keinginan untuk memperbaiki

nasibnya akan tetapi dibatasi oleh struktur ekonomi dan politik bangsa itu sendiri, (Jellinek,1994:239).

Berangkat dari kedua teori tersebut maka dapat dilihat bahwa kehidupan buruh migran di perkotaan yang sering terjebak dalam kemiskinan lebih disebabkan karena adanya sistem yang tidak menguntungkan mereka. Sistem yang tidak menguntungkan tersebut adalah upah pekerja sektor formal yang secara umum sangatlah rendah sehingga cita-cita untuk mencapai kesejahteraan hidup secara otomatis mengecil. Sedangkan kemiskinan yang disebabkan karena adanya faktor kultural tidaklah mutlak dapat dilekatkan pada buruh migran karena realitas mengatakan bahwa mereka telah berusaha masuk kedalam sektor pekerjaan formal dan berusaha sekuat tenaga untuk dapat meningkatkan kesejahteraan hidup.

Jadi dari beberapa hal tersebut di atas maka sesungguhnya kemiskinan yang terjadi dalam kehidupan para migran baik itu pekerja sektor formal maupun informal, bukanlah disebabkan karena adanya sifat alamiah yang melekat dalam diri mereka yaitu tetap berdiam diri dalam kungkungan kemiskinan, melainkan karena sistem dari lembaga ekonomi yang tidak menguntungkan bagi mereka. Hal tersebut tampak dari usaha-usaha yang dilakukan untuk keluar dari kemiskinan yang telah mereka lakukan seperti bekerja, melakukan usaha sampingan, dan pembentukan jaringan sosial.

1.5. Metode Penelitian

Tema dalam penelitian ini adalah tentang “profil kehidupan sosial dan ekonomi buruh migran di perkotaan”. Guna mengetahui profil kehidupan buruh

migran tersebut, peneliti akan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik *descriptive qualitative research*.

Metode penelitian kualitatif adalah sebuah prosedur penelitian yang berkenaan dengan data deskriptif, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk-bentuk simbolik seperti pernyataan-pernyataan tafsiran, tanggapan-tanggapan lisan harafiah, tanggapan-tanggapan non verbal, dan grafik-grafik. Data kualitatif ini biasanya diperoleh dari teknik-teknik semisal introspeksi, observasi partisipan, eksperimen terarah atau hipotetik, analisis "tipe ideal", dan analisa historik komparatif terhadap sesuatu masalah atau gejala (Amirin,1995:35).

Teknik "*descriptive qualitative research*" pada prinsipnya adalah untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu. Sedangkan secara harfiah, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat deskripsi mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Dalam arti bahwa penelitian deskriptif adalah akumulasi data dasar yang semata-mata tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan, mentest hipotesis, atau mendapatkan makna dan implikasi dari sesuatu (Suryabrata,1983:18-19).

Selain itu di dalam "*descriptive qualitative research*" data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan berupa angka-angka. Hal ini disebabkan oleh karena penerapan metode kualitatif, sehingga semua data yang dikumpulkan berkemungkinan akan menjadi kunci terhadap apa yang diteliti. Dengan demikian,

laporan penelitian akan berisikan kutipan-kutipan tentang data guna memberi gambaran utuh dalam penyajian laporan tersebut (Moleong, 1989:6).

1.5.1. Subyek dan Informan Penelitian

Subyek dari penelitian ini adalah buruh-buruh migran yang bekerja di pabrik-pabrik di sekitar Cengkareng Timur, yang bertempat tinggal di kampung Kayu Besar. Buruh-buruh tersebut kebanyakan indekos di kamar-kamar kontrakan milik penduduk Betawi asli. Walaupun juga ada orang luar Betawi yang membuka jasa indekos, akan tetapi jumlahnya kalah banyak dari warga Betawi asli yang membuka jasa serupa.

Selain itu informan dari penelitian ini adalah tokoh-tokoh masyarakat setempat, tetua warga, dan aparat kelurahan, orang-orang yang sering berinteraksi dengan subyek penelitian, dan pemilik jasa indekos yang di Kayu Besar. Semua informan tersebut digunakan sebagai pelengkap atau pendukung keterangan subyek utama penelitian.

1.5.2. Alasan Pemilihan Lokasi

Dalam penelitian ini, peneliti memilih lokasi yakni sebuah kampung di Jakarta Barat, yakni Kayu Besar. Alasan pemilihan lokasi ini dikarenakan ada beberapa hal yaitu, *Pertama*, Kayu Besar adalah merupakan sebuah kampung yang rata-rata penghuninya adalah sebagai buruh atau karyawan pabrik, ini disebabkan karena di daerah Cengkareng Timur banyak sekali terdapat pabrik. *Kedua*, kampung

Kayu Besar termasuk daerah *slum* (kumuh) yang mencerminkan sebuah kemiskinan kota. *Ketiga*, dari sebagian penduduk yang bekerja sebagai buruh tersebut kebanyakan mempunyai status migran. *Keempat*, dari karakteristik penduduk serta lingkungannya tersebut, diharapkan oleh peneliti dapat untuk menggambarkan secara detail mengenai tujuan dari penelitian itu sendiri.

1.5.3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk penelitian yang bersifat kualitatif ini, digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut,

Pertama, pengamatan partisipasi (*participation observation*), yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung dan melakukan interaksi penuh dalam kehidupan subyek yang diteliti. *Kedua*, wawancara mendalam (*in depth interview*), yaitu teknik pengumpulan data dengan cara wawancara mendalam dengan subyek penelitian yang biasanya pertanyaannya tidak disusun terlebih dahulu akan tetapi disesuaikan dengan keadaan dan ciri yang unik dari subyek penelitian. *Ketiga*, dokumentasi, yaitu langkah pengumpulan data berupa foto-foto ataupun catatan-catatan lapangan hasil dari pengamatan.

Dalam teknik pengamatan secara penuh, peneliti melakukannya dengan cara *indekos* (mondok) di salah satu pondokan yang semua penghuninya berprofesi sebagai buruh yang berstatus sebagai migran. Total waktu yang digunakan dalam pengamatan penuh ini adalah empat bulan terhitung sejak 3 Januari 2004 sampai dengan 2 Mei 2004. Selama kurun waktu penelitian tersebut, peneliti mempunyai

tujuh informan kunci dan beberapa informan pendukung lainnya yang dijadikan data primer. Selain itu digunakan pula kamera untuk pendokumentasian tempat penelitian.

1.5.4. Teknik Analisa Data

Di dalam teknik analisa data pada penelitian kualitatif, proses pertama kali adalah dengan melakukan persiapan. Langkah persiapan dapat diartikan sebagai langkah untuk memilih atau menyortir data sedemikian rupa sehingga hanya data yang terpakai saja yang tinggal. Langkah persiapan bermaksud merapikan data agar bersih, rapi, dan tinggal mengadakan pengolahan lanjutan atau menganalisis. Langkah kedua adalah dengan melakukan tabulasi. Dalam langkah tabulasi ini, terkandung langkah-langkah sebagai berikut: memberikan skor, memberikan kode, dan menyesuaikan jenis data dengan teknik analisa yang akan dipakai. Langkah selanjutnya adalah penerapan data sesuai dengan pendekatan penelitian. Maksud dari langkah ini adalah pengolahan data yang diperoleh dengan menggunakan rumus-rumus atau aturan-aturan yang ada, sesuai dengan pendekatan penelitian atau disain yang diambil (Arikunto, 1993:169).